



nawala

Edisi 10, Vol. 07

Perpustakaan Gedung Merah Putih KPK
Lt. 1, Jalan Kuningan Persada
Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

Perpustakaan Gedung Pusat Pelatihan Antikorupsi KPK
Lt. 4, Jalan Haji R. Rasuna Said
Kav. C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940



Penanganan Tindak Pidana Korporasi

Resensi dari buku "Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi"

Di Indonesia, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam perkara tindak pidana mendapatkan perhatian dalam beberapa Undang-Undang (UU) diantaranya UU Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tidak Pidana Ekonomi, UU Nomor 9 Tahun 1976 tentang Penyimpangan Narkotika, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagian besar materi undang-undang tersebut adalah hukuman materil, sedangkan untuk prosedur beracara yang merupakan hukum formil dan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan belum diatur secara khusus walaupun ada beberapa undang-undang seperti UU Tipikor yang telah mengaturnya secara terbatas.

Dalam melaksanakan fungsi mengatur bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Buku ini menghadirkan ulasan mengenai proses lahirnya PERMA tersebut dengan meneropong perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis. Beleid ini tidak hadir secara tergesa-gesa namun melalui berbagai kajian ilmiah serta mendengarkan pendapat dari pihak-pihak terkait agar dapat maksimal dalam pelaksanaannya. Kehadiran aturan ini telah ditunggu oleh berbagai kalangan yang menghendaki agar proses hukum terhadap korporasi-korporasi yang diduga telah mendatangkan kerugian bagi negara dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan mematuhi *due process of law* dan mengedepankan supremasi hukum.

Permasalahan-permasalahan mengenai soal penanganan pidana korporasi sangat baik



dituangkan dalam buku ini. Meskipun buku ini merupakan kajian akademik dari para akademisi, penyidik dan penuntut umum, namun isi dari buku ini tetap mengalir dari tiap bab-babnya. Dalam penyusunannya, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan prioritas analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi literatur dengan akademisi untuk memperkuat hasil analisis. Oleh sebab itu buku ini sangat berguna bagi pembaca yang berasal dari penegak hukum yang sering menghadapi kasus tindak pidana penanganan pidana korporasi. Para penegak hukum yang membaca buku ini tentu saja akan menambah pengetahuan serta lebih kritis lagi dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Selain itu bagi pembuat kebijakan, gagasan perubahan hukum UU Tindak Pidana Korporasi yang dibawa dalam buku ini sangat berguna dalam bahan referensi ketika merevisi UU Tindak Pidana Korporasi agar menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih baik lagi dalam memberantas tindak pidana korupsi. Maka segera baca buku ini secara digital maupun fisik melalui perpustakaan KPK Republik Indonesia.



Penulis : Tim POKJA KPK,
Mahkamah Agung
Penerbit : Mahkamah Agung RI
Tahun Terbit : 2017
Tebal Buku : 194



A Bibliometric Analysis of Corruption in the Public Sector

Ilmi Farikhoh, Anis Chariri

This study aims to systematically analyze and map main research streams, research development, and further research direction in corruption studies. It uses bibliometric analysis to analyze 759 articles in the Scopus database from 2011 to 2020 through the software VOSviewer version 1.6.17. It concludes that public sector corruption is a topic of interest internationally. Articles by Chan et al. (2011), Williams and Shahid (2016), and articles in the Journal of Financial Crime are the main reference sources. Certain keywords, such as management, regulation, tax evasion, health care, and investment provide a potential focus for research in the future.



Analysis of Good Corporate Governance's Ineffectiveness in Preventing Corruption in BUMN

Prianto Budi Saptono, Dwi Purwanto

This study aims to provide a brief report and analyze the ineffectiveness of Good Corporate Governance (GCG) in preventing corruption in State-Owned Enterprises (BUMN). This study uses qualitative research methods with data collection through in-depth interviews. Our findings show that Communication Factors, Resource Factors, Disposition Factors (attitudes) and Bureaucratic Factors affect the ineffectiveness of GCG in preventing corruption in BUMN. BUMN implements a gratification control program to prevent corruption by establishing a Gratification Control Unit (UPG), which functions as a service and information unit (help desk) for gratification control. In addition, the company also provides a whistleblowing system. BUMN employees/officials and the public who wish to report an action that indicates a violation within the BUMN environment can report it through this system. However, the program has not been effective in reducing and eliminating the corrupt behavior of BUMN employees/officials due to the lack of leadership, integrity, and values from BUMN employees/officials in preventing corruption. UPG also does not focus on preventing corruption. In addition, policy implementers often fail in carrying out their duties because of the shyness and fear of implementing corruption control policies.



Koleksi Bulan Ini!



Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Buku ini mengulas korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.



Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Eksistensi suatu korporasi memiliki andil yang cukup besar baik bagi kepentingan manusia ataupun bagi kepentingan negara.



Panduan Teknis : Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Korporasi Tindak Pidana Korupsi

Pedoman teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi diperlukan untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan langkah-langkah pembuktian, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Akuntansi yang baik adalah hal yang penting bagi bisnis dan keputusan investasi yang baik. Akuntansi yang buruk adalah suatu hal yang tidak dapat ditoleransi.



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi

Buku rujukan Ilmu Hukum ini menyoroti berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi di Indonesia.



Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak Permasalahan Penegakan Hukum

Semula, suatu kejahatan hanya dipahami dan dipersepsi sebatas pada kejahatan konvensional. Namun dengan munculnya teori yang diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland di hadapan American Sociological Society tahun 1939, yang disebut dengan *white-collar crime* telah menambah perbendaharaan tentang perkembangan suatu kejahatan, termasuk kejahatan korporasi.